

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang jelas dan terarah, sehingga visi pembangunan Kabupaten Parigi Moutong dapat diwujudkan. Strategi dan arah kebijakan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2013-2018 ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yang merupakan satu kesatuan perencanaan yang tidak dapat dipisahkan (*tidak parsial*), sehingga berkesinambungan dan berkelanjutan dari tahun ke tahun.



Gambar 6.1

Tahapan Utama RPJPD Kabupaten Parigi Moutong 2005-2025

Mengacu pada RPJPD Kabupaten Parigi Moutong 2005-2025 sebagaimana disajikan pada Gambar 6.1., Kabupaten Parigi Moutong sudah memasuki periode RPJMD tahap ke-2 dengan fokus pembangunan pada 3 (tiga) isu utama yaitu:

1. Keunggulan kompetitif pada Sektor Pertanian;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM);
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan layanan publik.

Ketiga fokus tersebut akan menjadi prioritas utama pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong, dengan mengimplementasikan beberapa strategi dan arah kebijakan yang disesuaikan dengan visi dan misi sebagai berikut.

Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*)

Strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparatur
Sebagaimana telah disebutkan dalam isu-isu strategis bahwa etos kerja masyarakat, termasuk aparatur di Kabupaten Parigi Moutong masih perlu ditingkatkan. Olehnya itu, peningkatan profesionalisme pegawai menjadi hal mutlak yang perlu mendapat prioritas.
2. Meningkatkan efektifitas kinerja sumber daya manusia (SDM) aparatur
Kinerja aparatur yang baik merupakan modal yang sangat esensial untuk menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jika aparatur dapat bekerja secara efektif, maka tujuan dan sasaran yang harus dicapai sebagaimana indikator target yang telah ditetapkan akan dapat dicapai tepat waktu.
3. Meningkatkan kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel
Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan kerjasama dan hubungan yang baik antara pemerintah (birokrasi) dan masyarakat (publik). Olehnya itu, kinerja birokrasi dituntut untuk memberikan layanan yang responsif (cepat tanggap), transparan, dan akuntabel agar dapat tercapai layanan yang memuaskan (*optimal satisfaction*).
4. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, dan optimalisasi pendapatan daerah.
Pemerintahan yang bersih dan berwibawa dapat dilihat dari kinerja pemerintah dalam mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran dan aset daerah. Pemanfaatan anggaran perlu diprioritaskan pada hal-hal strategis yang menjadi fokus pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan, perbaikan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*), maka **kebijakan** yang perlu dilakukan adalah:

1. Perbaiki sistem penerimaan (*recruitment*) pegawai negeri sipil (PNS).
Penerimaan pegawai akan diprioritaskan pada SDM yang memenuhi kualifikasi sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang harus dikerjakan oleh pegawai tersebut. Sehingga, latar belakang pendidikan pegawai menjadi hal mutlak yang menjadi prioritas. Penerimaan pegawai akan dilakukan secara transparan, profesional, akuntabel, dan *independent*.

2. Penegakan sistem *reward and punishment* pegawai.
Semangat pegawai dalam bekerja perlu untuk dipertahankan guna mengoptimalkan kinerja pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja baik perlu diberikan penghargaan agar mereka terus bersemangat dan memiliki prestasi kerja yang baik, dan sebaliknya pegawai yang tidak disiplin dan memiliki kinerja yang buruk perlu diberikan pengarahan, teguran, dan bahkan hukuman. Jika kebijakan ini diimplementasikan dengan komitmen yang sungguh-sungguh, maka kinerja pegawai akan semakin baik.
3. Peningkatan pelayanan publik dari yang “kurang memuaskan” menjadi “memuaskan” dan bahkan hingga mencapai “sangat memuaskan”.
Pegawai yang kompeten perlu dibarengi dengan itikad baik (*willingness*) dalam memberikan pelayanan kepada publik, sehingga publik memiliki tingkat kepuasan yang tinggi.
4. Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah.
Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Dengan demikian pengelolaan sumberdaya yang dimiliki pemerintah Kabupaten Parigi Moutong perlu diarahkan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah.
5. Mempertahankan opini BPK untuk tetap pada opini WTP.
Untuk mencapai opini WTP perlu dilakukan hal-hal berikut:
 - a. Pendataan secara baik tentang bukti kepemilikan dan penyelesaian masalah semua aset tidak bergerak/tetap.
 - b. Perlu pencatatan dan dokumentasi secara baik dan teratur atas pengadaan dan pengeluaran aset tetap dan dilakukan inventarisasi secara berkala kondisi aset tetap (baik, rusak, rusak berat).
 - c. Perlu pencatatan secara benar dan tertib barang-barang habis pakai pada semua SKPD.
 - d. Perlu penatausahaan keuangan yang baik sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah bagi setiap SKPD yang meliputi:
 - 1) Pembuatan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan secara benar dan tertib sesuai peraturan yang berlaku.
 - 2) Pembuatan, pencatatan dan pelaporan keuangan melalui buku-buku pembantu lainnya yang diperlukan

- untuk mendukung terlaksananya laporan keuangan yang baik dan benar sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah.
- e. Perlu penempatan pengelola keuangan yang berlatar belakang akuntansi pada setiap SKPD, terutama pada SKPD-SKPD yang masih bermasalah pada penatausahaan keuangan, pencatatan aset tetap, aset lancar, dan barang-barang habis pakai.
 - f. Dalam jangka panjang semua pengelola keuangan dan pengelola aset pada setiap SKPD berlatar belakang pendidikan akuntansi (minimal D3 Akuntansi).
 - g. Perlu pelatihan bagi tenaga-tenaga pengelola keuangan dan pengelola aset yang disertai dengan sertifikat.

Agar semua strategi dan kebijakan di atas dapat dilakukan, maka perlu keterlibatan aktif tiga domain, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat). Ketiga domain ini diharapkan saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. *State* berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private sector* menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Misi 2: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan, dan ketakwaan

Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan dan ketakwaan adalah:

1. Mengembangkan kerjasama dengan pendidikan tinggi dan dunia usaha untuk mewujudkan kemandirian masyarakat terdidik
Kerjasama yang baik antara pemerintah, pendidikan tinggi dan dunia usaha (*ABG=academic, business, government*) dengan komitmen yang sungguh-sungguh akan menjadi modal dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong.
2. Mendorong penyelenggaraan pendidikan 12 tahun dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dasar, sehingga setiap tamatan mempunyai kompetensi dasar yang dapat digunakan untuk hidup dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan

Kompetensi dan latar belakang pendidikan tenaga pendidik (dan tenaga kependidikan) merupakan hal utama yang perlu dibangun agar dapat menghasilkan output (lulusan) yang berkualitas. Selain kualitas dan kompetensi tenaga pendidik, sarana, dan prasarana pendidikan juga perlu dibangun dan diperbaiki, agar proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan baik.

4. Meningkatkan pemerataan pendidikan
Yaitu dengan cara meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar, dengan target utama daerah dan masyarakat miskin, terpencil, dan terisolasi di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
5. Meningkatkan kemudahan dan kemampuan mengakses kesehatan yang bermutu secara adil, dan merata bagi masyarakat, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih, dan sehat.
6. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak/bayi dengan cara:
 - Melakukan intervensi pelayanan inti kesehatan bagi anak yang meliputi: imunisasi, manajemen terpadu balita sakit (MTBS), dan intervensi gizi pada anak.
 - Memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor risiko lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan, terutama pada penyediaan air bersih, dan sanitasi layak.
 - Gerakan pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang sudah terbukti dapat menurunkan angka kematian balita.
7. Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan kesehatan masyarakat melalui:
 - Peningkatan promosi kesehatan yang berupa penyuluhan/pendidikan kesehatan kepada masyarakat tentang pola asuh bayi dan anak sehat.
 - Optimalisasi pemanfaatan pusat-pusat layanan kesehatan, seperti Posyandu dan Polindes.
 - Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong terutama untuk daerah-daerah terpencil.
8. Memantapkan pendidikan agama di sekolah-sekolah dan membangun,serta mengoptimalkan pemanfaatan rumah ibadah. Selain itu, perlu didukung kerjasama antara pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan tokoh/pemuka agama dalam menciptakan kehidupan beragama yang kondusif. Kapasitas intelektual seseorang (IQ) akan menjadi lebih baik, jika dibarengi dengan pendidikan agama (spiritual), sehingga akan memiliki pribadi manusia dengan emosional, dan spiritual

quotient.

Kebijakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan, dan ketakwaan adalah:

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan angka melek huruf.
Angka melek huruf merupakan salah satu indikator penentu IPM yang relatif mudah untuk diintervensi. Olehnya itu, pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan angka melek huruf, dengan cara mendata semua penduduk yang buta huruf dan memberikan penanganan khusus, sehingga angka melek huruf dapat dioptimalkan.
2. Pemantapan penyelenggaraan pendidikan 12 tahun
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan memberikan prioritas pada penyelenggaraan pendidikan 12 tahun dengan cara:
 - Meningkatkan efisiensi manajemen pendayagunaan sumber daya pendidikan dan mengupayakan agar semua lembaga pendidikan dasar dan menengah (SD dan SMP) dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efisien dan efektif.
 - Meningkatkan akses pendidikan dasar harus dilakukan bersama-sama dengan perbaikan mutu pendidikan. Dengan demikian, penuntasan program pendidikan dasar tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan mutu
3. Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik, sarana-prasarana pendidikan, dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Parigi Moutong
4. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan cara:
 - Perbaikan sistem rujukan dari rumah ke puskesmas dan ke rumah sakit. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan: (1) dalam memutuskan untuk mencari pelayanan; (2) dalam mencapai (menuju) pusat pelayanan kesehatan; (3) dalam penanganan.
 - Sosialisasi pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat kepada masyarakat
 - Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan kualifikasi tenaga kesehatan (dokter umum, spesialis, bidan, tenaga paramedis).
5. Peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu dan anak/bayi melalui:
 - Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas khususnya bagi ibu hamil, wanita usia subur (WUS), dan remaja putri.
 - Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat

tentang pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan ibu. Perilaku masyarakat yang masih memanfaatkan jasa dukun (“orang pintar”) dalam proses melahirkan dan pasca melahirkan perlu diberikan pemahaman agar mereka dapat ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dalam proses persalinan.

6. Pemerataan akses layanan kesehatan dan peningkatan pendidikan tentang kesehatan melalui:
 - Peningkatan jumlah pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan hingga menyentuh masyarakat di daerah pedesaan, terpencil dan perbatasan.
 - Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan
7. Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan tokoh/pemuka agama dalam menciptakan kehidupan beragama yang kondusif. Pemantapan pendidikan agama di sekolah-sekolah dan pembangunan serta peningkatan pemanfaatan sarana atau rumah ibadah. Jika masyarakat Kabupaten Parigi Moutong terjamin kesehatan dan pendidikannya serta memiliki dasar agama yang kuat, maka akan menjadi modal untuk membangun SDM yang berdaya saing.

Upaya peningkatan SDM yang berdaya saing ini secara keseluruhan dilakukan melalui peningkatan kualitas, kompetensi, kemampuan manajemen dan penerapan/pemanfaatan teknologi informasi, serta dasar agama yang kuat. Potensi Kabupaten Parigi Moutong yang sangat baik perlu dimanfaatkan dan dikelola oleh tangan-tangan trampil dan berdedikasi tinggi guna mendorong percepatan pembangunan di daerah ini. Potensi dan sumberdaya (*resources*) didukung oleh kualitas sumberdaya manusia yang handal akan merubah Kabupaten Parigi Moutong ke arah yang lebih baik.

Misi 3: Percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai misi ketiga ini adalah:

1. Melakukan percepatan pengentasan kemiskinan dengan cara memfokuskan pada daerah-daerah (kecamatan) yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi.
Pengentasan kemiskinan akan dapat dipercepat jika didasarkan pada intervensi dengan pendekatan wilayah (*regional approach*), sehingga program dan kegiatan yang dilakukan untuk pengentasan penduduk miskin benar-benar tepat sasaran.

2. Meningkatkan perekonomian daerah dengan cara mengembangkan agribisnis kelautan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat.
3. Membuka kesempatan kerja seluas-luasnya dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan.
Pemerintah daerah bersinergi dengan sektor swasta akan memberikan prioritas pada pembukaan kesempatan kerja dengan cara menjamin iklim usaha yang kondusif sehingga sektor swasta dapat tumbuh dengan baik. Disisi lain, masyarakat sebagai pencari kerja perlu disiapkan (diberikan pembekalan dan pelatihan) sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Agar tidak tergantung pada kesempatan kerja pada sektor formal, pemerintah akan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat agar kesempatan kerja sektor informal dapat ditingkatkan.

Kebijakan yang perlu dilakukan guna mendukung percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan khusus pada daerah kantong kemiskinan (kecamatan yang memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak). Kebijakan, strategi dan program pengentasan kemiskinan akan diprioritaskan pada daerah-daerah tersebut, seperti kebijakan alokasi anggaran serta program-program pemberdayaan masyarakat dan bantuan pada masyarakat miskin.
2. Peningkatan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang memadai untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di sektor pertanian dan perikanan.
3. Peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong peningkatan investasi daerah. Kabupaten Parigi Moutong yang memiliki potensi pertanian, kelautan dan pariwisata akan menempuh langkah-langkah strategis dan sistematis guna mengembangkan perekonomian rakyat, diantaranya adalah dengan mengembangkan budaya usaha dan memberikan pelatihan kewirausahaan. Selain itu pemerintah akan mendorong masuknya investasi di berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata.

4. Pemberdayaan ekonomi rakyat dengan kepastian modal dan kepastian pasar. Permasalahan klasik yang dihadapi oleh masyarakat miskin dalam aktivitas ekonomi adalah kesulitan modal dan akses pasar. Pada umumnya, akses untuk memperoleh modal dan jaringan pasar hanya dikuasai oleh perusahaan besar dan perusahaan multinasional yang sudah sangat profesional. Agar masyarakat miskin memiliki kesempatan yang sama dengan usaha-usaha yang besar, maka diperlukan keberpihakan kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan modal dan akses pasar.
5. Pemenuhan hak dasar, hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, sumberdaya alam yang terdiri atas:
 - a. Jaminan kecukupan pangan yang berkualitas dan terjangkau.
 - b. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan rentan.
 - c. Penyediaan dan pemerataan lapangan pekerjaan yang layak.
 - d. Peningkatan pendidikan masyarakat, baik pendidikan formal maupun non formal.
 - e. Penyediaan tempat tinggal yang layak dan permukiman yang sehat.
 - f. Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar yang memadai.
 - g. Peningkatan penjaminan dan perlindungan hak perorangan dan hak komunal atas tanah.
 - h. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
 - i. Peningkatan perlindungan dan ketenteraman dalam masyarakat.
 - j. Optimalisasi partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan proses pembangunan.
6. Kebijakan yang berfokus pada upaya menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, melalui:
 - Penajaman prioritas program dan sasaran untuk kelompok masyarakat sangat miskin.
 - Peningkatan bantuan perlindungan sosial bagi kelompok miskin.
 - Peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin dan lembaga desa/kelurahan dalam melaksanakan pembangunan.

- Peningkatan peran serta masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di tingkat desa/kelurahan.
- Peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem informasi yang menunjang pemberdayaan masyarakat.
- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan.
- Peningkatan kemampuan manajemen keuangan desa/kelurahan.
- Peningkatan jumlah anggaran bagi penduduk miskin yang dikelola desa/kelurahan.
- Peningkatan pengawasan pelaksanaan penggunaan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.

7. Penyediaan dan perluasan lapangan kerja produktif

Upaya perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan usaha.

- Kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja.
Kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat, termasuk perempuan dan kaum muda. Selain itu, pekerjaan yang ditawarkan harus mampu menjamin penghasilan yang tetap. Selain itu juga mendorong masyarakat untuk belajar berusaha secara mandiri melalui kelompok, sehingga mampu mewujudkan jiwa kewirausahaan.
- Peningkatan kesempatan kerja
Upaya peningkatan kesempatan kerja dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja produktif dengan memanfaatkan potensi lokal, khususnya sektor agribisnis dan kelautan secara optimal dan dilakukan secara mandiri.
- Pengembangan usaha.
Pengembangan usaha dilakukan melalui pengembangan budaya usaha dan pelatihan kewirausahaan.
- Kebijakan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja antara lain: (1) pengembangan kewirausahaan; (2) penguatan kelembagaan dan kemampuan manajemen usaha; (3) peningkatan kapasitas kerja masyarakat, termasuk perempuan dan kaum muda.

Misi 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pemerataan pembangunan dan mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat.

Strategi yang perlu dilakukan meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pemerataan pembangunan dan mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan jalan khususnya jalan akses menuju lokasi pusat ekonomi produktif dan jalan pada kantong-kantong kemiskinan
2. Meningkatkan pembangunan jembatan khususnya pada jembatan yang menghubungkan pusat kota dengan daerah kemiskinan agar dapat memperbaiki akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih baik
3. Meningkatkan pembangunan gedung/bangunan untuk pelayanan publik

Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pemerataan pembangunan dan mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat akan dirumuskan **kebijakan** sebagai berikut:

1. Penyediaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan prasarana wilayah guna membuka keterisolasian
2. Penanganan infrastruktur di daerah strategis dan cepat tumbuh
3. Optimalisasi dan revitalisasi lahan dan sarana prasarana pertanian melalui peningkatan dan pengembangan infrastruktur pertanian.
4. Membangun dan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas publik termasuk rumah sakit, gedung sekolah, pelabuhan, pasar tradisional/modern, dan sebagainya.
5. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur perhubungan

Misi 5: Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah.

Strategi yang akan ditempuh guna memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah diantaranya adalah:

1. Menjaga dan meningkatkan kerukunan antara warga
Pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong akan berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan jika warga secara bersama-sama mendukung jalannya pembangunan.

2. Meningkatkan harmonisasi hubungan antar pihak.
Stakeholder pembangunan melibatkan pihak pemerintah, dunia usaha dan partisipasi aktif masyarakat. Jika semua pihak memiliki hubungan yang harmonis maka koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan dapat diwujudkan.
3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum dengan melibatkan semua *stakeholders*.
Keamanan dan ketertiban umum merupakan hal yang mendasar dalam percepatan pembangunan. Olehnya itu, keamanan dan ketertiban umum perlu terus untuk dipertahankan dan ditingkatkan.
4. Meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP (organisasi kepemudaan)

Kebijakan guna memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penegakan supremasi hukum
2. Jaminan kepastian hukum
3. Penegakkan hukum
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan kemandirian masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar umat beragama (FKUB)
6. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah pada berbagai tingkatan
7. Akselerasi pemeliharaan ketertiban dan keamanan berbasis harmoni sosial dan kesatuan bangsa
8. Pelibatan semua elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan secara berjenjang

Misi 6: Melaksanakan pengelolaan, penataan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai misi ke-6 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mempertahankan fungsi hutan melalui peningkatan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan dan kolaboratif dengan melibatkan masyarakat; meningkatkan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat desa disekitar hutan; dan mengendalikan kerusakan kawasan hutan melalui upaya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan serta fasilitasi penanganan pemulihan kerusakan lingkungan.

2. Menyiapkan sarana dan prasarana bagi nelayan dalam menangkap ikan. Jika nelayan memiliki peralatan dan pendidikan yang cukup, maka *illegal fishing* akan dapat diminimalisir.
3. Meningkatkan rasio luasan kawasan tertutup pepohonan melalui pengelolaan lahan kritis dan konservasi lahan berupa usaha pencegahan kerusakan baru, memperbaiki kerusakan, pemeliharaan dan mempertahankan serta meningkatkan kesuburan lahan.
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem pertambangan yang baik dan benar dengan tidak mengabaikan aspek lingkungan
5. Mempertahankan fungsi RTH dan taman kota sebagai komitmen *stakeholders* untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan melibatkan masyarakat.
6. Mengurangi proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air bersih melalui peningkatan sarana prasarana dan layanan jaringan perpipaan air bersih PDAM di perkotaan; mengembangkan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas), Inventarisasi, pemulihan dan perlindungan terhadap sumber sumber air baik di pedesaan maupun perkotaan melalui kerja sama dengan masyarakat dan dengan pemerintah tingkat RT dan RW
7. Mengoptimalkan peran *stakeholder* dalam pembangunan rumah seperti memanfaatkan potensi lembaga pembiayaan keuangan lokal, dalam pembiayaan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Kebijakan yang akan dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan, penataan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Penegakan peraturan-peraturan yang mendukung terciptanya pengelolaan hutan lestari
2. Peningkatan kesadaran nelayan agar tidak melakukan illegal fishing dengan menyediakan sarana dan prasarana menangkap ikan yang memadai
3. Peningkatan luas kawasan tertutup pepohonan
4. Penegakan peraturan-peraturan yang mendukung terciptanya sistem pertambangan yang baik dan benar melalui sosialisasi Perda tentang pertambangan mineral

5. Peningkatan luas RTH dan pemeliharaan taman kota dengan melibatkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat agar Parigi dapat meraih Kota Adipura

Strategi dan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana yang telah diuraikan di atas akan disesuaikan (*match*) dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan ini akan dirangkum dan disajikan pada Tabel 6.1. sebagai berikut.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan

VISI: “MELANJUTKAN TERWUJUDNYA KABUPATEN TERDEPAN YANG PRODUKTIF, MAJU, AMAN, TERTIB DAN BERDAYA SAING TAHUN 2020”

Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>good governance</i>)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi	Meningkatnya kualitas SDM aparatur mencapai 60%	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur	Perbaikan sistem penerimaan/rekrutment aparatur
	Meningkatnya kedisiplinan SDM aparatur hingga mencapai 75%	Meningkatkan efektivitas kinerja SDM aparatur	Penegakan sistem <i>reward and punishment</i> pegawai
	Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level “memuaskan”	Meningkatkan profesionalisme SDM pada semua instansi/SKP D yang memberikan pelayanan langsung	Penyediaan fasilitas kerja pegawai yang memadai Optimalisasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>good governance</i>)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kepada masyarakat	
2. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah mencapai level “rata-rata baik” untuk seluruh SKPD	Meningkatkan kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah
	Mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, dan optimalisasi pendapatan daerah	Peningkatan kemampuan/kompetensi sumberdaya aparatur dalam penatausahaan keuangan daerah Pengembangan dan penyempurnaan sistem (sarana) pengelolaan keuangan daerah Penyusunan regulasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

**Misi 2:
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan dan ketakwaan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia mencapai 72-73	Meningkatkan IPM melalui perbaikan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat	Layanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin Penyediaan dan pemerataan fasilitas kesehatan yang memadai khususnya di daerah-daerah terisolir Prioritas anggaran pendidikan dan kesehatan
	Meningkatnya angka melek huruf mencapai 95%-96%	Mengembangkan kerjasama dengan pendidikan tinggi dan dunia usaha untuk mewujudkan kemandirian masyarakat terdidik	Prioritas anggaran pada layanan pendidikan formal dan informal, khususnya penuntasan buta aksara Pemerataan tenaga kependidikan di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong
	Meningkatnya rata-rata lama sekolah mencapai 9-10 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong penyelenggaraan pendidikan 12 tahun • Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan 	Peningkatan alokasi anggaran bidang pendidikan Pemerataan akses layanan pendidikan

Misi 2: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan dan ketakwaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dasar	hingga ke daerah-daerah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan
	Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) SD=106-107 SMP=77-78 SMA=63-64	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik • Memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan • Meningkatkan pemerataan pendidikan 	Prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan
	Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan		
	Meningkatnya angka partisipasi murni (APM) SD=93-94 SMP=61-62 SMA=52-53		
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya usia harapan hidup mencapai 67-68 tahun	Meningkatkan Kemudahan dan Kemampuan mengakses kesehatan yang bermutu secara adil dan merata bagi masyarakat, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
	Meningkatnya kelangsungan	Meningkatkan kualitas	1. Optimalisasi

**Misi 2:
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan dan ketakwaan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	hidup bayi	kesehatan ibu dan anak/bayi	<p>pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi neonatal</p> <p>2. Peningkatan pengetahuan masyarakat (khususnya ibu hamil) tentang kesehatan bayi/anak</p>
	Menurunnya balita gizi buruk menjadi 1-0%	Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan kesehatan masyarakat	Pemerataan akses layanan kesehatan dan peningkatan pendidikan tentang kesehatan
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan masyarakat	<p>Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam partai politik, birokrasi pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan</p> <p>Memperkuat pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah</p> <p>Menurunkan</p>	<p>Adanya <i>political will</i> dan <i>affirmative action</i> terhadap perempuan</p> <p>Penegakan regulasi terkait perlindungan anak</p> <p>Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar stakeholders (termasuk LSM perempuan dan perlindungan</p>

Misi 2: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan dan ketakwaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kekerasan dan eksploitasi terhadap anak	anak)
4. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kualitas SDM tenaga instruktur pelatihan Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan yang memadai	Kemitraan pelatihan tenaga kerja antara penyelenggara dan pengguna tenaga kerja Pengembangan kelembagaan pelatihan
5. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan	Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama	Kerjasama pemerintah dan tokoh agama dalam pemeliharaan situasi kondusif bagi kehidupan beragama	Penyediaan sarana / prasarana ibadah
	Terpeliharanya kerukunan intra dan antar umat beragama		Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pemuka agama

Misi 3: Percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menurunkan tingkat kemiskinan	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Melakukan percepatan pengentasan kemiskinan dengan cara memfokuskan	Pengurangan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan,
	Menurunnya persentase		

Misi 3: Percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	penduduk miskin menjadi 10-11%	pada daerah-daerah (kecamatan) yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi	melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penajaman prioritas program dan sasaran untuk kelompok masyarakat sangat miskin. • Peningkatan bantuan perlindungan sosial bagi kelompok miskin. • Peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin dan lembaga desa/kelurahan dalam melaksanakan pembangunan. • Peningkatan peran serta masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di tingkat desa/kelurahan.
	Menurunnya indeks kedalaman kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan kepastian modal dan kepastian pasar	
	Menurunnya indeks keparahan kemiskinan		
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi mencapai 8%-9%	Mengembangkan ekonomi kerakyatan	Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
	Meningkatnya PDRB ADH Konstan 8%-9%	Menyediakan dan memperbaiki serta menata dengan baik daerah tujuan	Pembangunan akses menuju sentra ekonomi
	Meningkatnya		Peningkatan

Misi 3: Percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	PDRB per kapita 20 juta – 22 juta	wisata (DTW)	anggaran pariwisata
	Menurunnya tingkat inflasi mencapai 5%-6%	Pembangunan fasilitas dan infrastruktur di daerah tujuan wisata	Regulasi yang mendukung investasi
		Menciptakan iklim investasi yang kondusif	
	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 2%-3%	Membuka kesempatan kerja seluas-luasnya dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan	Penyediaan dan perluasan lapangan kerja produktif
	Meningkatnya jumlah koperasi aktif, UMKM dan industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Parigi Moutong	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi IKM dan UKM dan koperasi	Penguatan kapasitas manajerial dan teknologi industri berbasis komoditas unggulan
		Menciptakan akses pasar dan akses informasi bagi IKM dan UKM	Bantuan peralatan dan permodalan bagi IKM dan UKM
			Penguatan dan pembinaan kapasitas manajer dan pengurus koperasi
			Pembinaan <i>link and match</i> antara koperasi dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya

Misi 3: Percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Misi 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pemerataan pembangunan dan mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menjadi 34%-35% • Meningkatkan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik menjadi 61%-62% 	Meningkatkan pembangunan jalan baik jalan yang sudah rusak maupun jalan baru yang prioritas	Peningkatan pembangunan jalan khususnya jalan akses menuju lokasi pusat ekonomi produktif dan jalan pada kantong-kantong kemiskinan
	Meningkatnya jumlah jembatan	Meningkatkan pembangunan jembatan baik jembatan yang sudah rusak maupun jembatan baru yang prioritas	Prioritas anggaran untuk pembangunan jembatan khususnya pada jembatan yang menghubungkan pusat kota dengan daerah kemiskinan agar dapat memperbaiki akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang

Misi 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pemerataan pembangunan dan mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			lebih baik serta peningkatan perekonomian
	Meningkatnya jumlah gedung/bangunan milik publik	Meningkatkan pembangunan gedung/bangunan milik publik	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana publik

Misi 5: Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Menurunnya konflik komunal dan konflik SARA	Menjaga dan meningkatkan kerukunan antara warga serta meningkatkan harmonisasi hubungan antar pihak Menumbuhkan wawasan kesatuan bangsa Menurunkan terjadinya konflik komunal, SARA dan konflik antar wilayah	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar umat beragama (FKUB)
	Meningkatnya kegiatan pembinaan	Memberikan kesempatan yang sama dan	Membangun kerjasama dan koordinasi

**Misi 5:
Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
guna memacu akselerasi pembangunan daerah**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	terhadap LSM, Ormas, dan OKP (organisasi kepemudaan)	mendorong pemuda untuk berprestasi dalam bidang olahraga dan seni Meningkatkan aktivitas dan <i>event</i> olah raga dan seni dari tingkat desa sampai kabupaten Meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP (organisasi kepemudaan)	dengan <i>stakeholders</i> (swasta, NGO/Ornop, Parpol, Ormas) dalam meningkatkan prestasi dan event-event olah raga di Kabupaten Parigi Moutong Optimalisasi pembinaan LSM, Ormas dan OKP
	Menurunnya tingkat kriminalitas	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum dengan melibatkan semua <i>stakeholders</i>	Peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui optimalisasi peran polisi pamong praja, satuan Linmas dan koordinasi aparat kepolisian serta dukungan masyarakat
	Menurunnya tingkat pelanggaran PERDA		

**Misi 6:
Melaksanakan pengelolaan, penataan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkelanjutan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
--------	---------	----------	----------------

**Misi 6:
Melaksanakan pengelolaan, penataan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkelanjutan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memperbaiki pengelolaan dan penataan, serta pelestarian sumberdaya alam	Menurunnya tingkat kerusakan hutan (<i>deforestation</i>)	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia	Penegakan peraturan-peraturan yang mendukung terciptanya pengelolaan hutan lestari
	Menurunnya <i>illegal logging</i>		
	Menurunnya <i>illegal fishing</i>	Menyiapkan sarana dan prasarana bagi nelayan dalam menangkap ikan	Peningkatan kesadaran nelayan agar tidak melakukan <i>illegal fishing</i> dengan menyediakan sarana dan prasarana menangkap ikan yang memadai
	Menurunnya <i>illegal mining</i>	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem pertambangan yang baik dan benar dengan tidak mengabaikan aspek lingkungan	Penegakan peraturan-peraturan yang mendukung terciptanya sistem pertambangan yang baik dan benar melalui sosialisasi Perda tentang pertambangan mineral
	Meningkatnya kawasan tertutup pepohonan	Meningkatkan rasio luasan kawasan tertutup pepohonan melalui pengelolaan lahan kritis dan konservasi lahan berupa usaha pencegahan kerusakan	Peningkatan luas kawasan tertutup pepohonan

**Misi 6:
Melaksanakan pengelolaan, penataan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkelanjutan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		baru, memperbaiki kerusakan, pemeliharaan dan mempertahankan serta meningkatkan kesuburan lahan	
	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Mempertahankan fungsi RTH dan taman kota sebagai komitmen <i>stakeholders</i> untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan melibatkan masyarakat	Peningkatan luas RTH dan pemeliharaan taman kota dengan melibatkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat agar dapat Parigi dapat meraih Kota Adipura
	Meningkatnya luas taman kota	Mempertahankan fungsi RTH dan taman kota sebagai komitmen <i>stakeholders</i> untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan melibatkan masyarakat	Peningkatan luas RTH dan pemeliharaan taman kota dengan melibatkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat agar dapat Parigi dapat meraih Kota Adipura
	Menurunnya kawasan kumuh di daerah pesisir dan pedalaman	Mengoptimalkan peran <i>stakeholder</i> dalam pembangunan rumah seperti memanfaatkan potensi lembaga pembiayaan keuangan lokal, dalam pembiayaan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	Perbaikan rumah dan lingkungan di kawasan kumuh

Misi 6:**Melaksanakan pengelolaan, penataan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkelanjutan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya akses air bersih layak	Mengurangi proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air bersih melalui peningkatan sarana prasarana dan layanan jaringan perpipaan air bersih PDAM di perkotaan; mengembangkan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas), Inventarisasi, pemulihan dan perlindungan terhadap sumber sumber air baik di pedesaan maupun perkotaan melalui kerja sama dengan masyarakat dan dengan pemerintah tingkat RT dan RW	Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih
	Meningkatnya sanitasi layak	Mengurangi proporsi rumah tangga yang tidak memiliki akses sanitasi	Pembangunan sanitasi layak bagi masyarakat

**Misi 6:
Melaksanakan pengelolaan, penataan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkelanjutan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>dasar melalui peningkatan ketersediaan prasarana sarana sanitasi dasar yang memadai melalui partisipasi masyarakat; dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase melalui pembinaan SDM</p>	
<p>2. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang lestari dan bijaksana</p>	<p>Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya</p> <p>Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan (permukiman)</p>	<p>Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah, tata ruang kota dan pemanfaatan tata ruang secara terkontrol dan terkendali</p> <p>Mempertahankan khazanah arsitektur lokal</p> <p>Menjaga dan memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan perkembangan</p>	<p>Mengimplementasikan secara konsisten Perda Rencana Tata Ruang Wilayah</p> <p>Penguatan regulasi yang bertujuan untuk mempertahankan khasanah arsitektur lokal dan mempertahankan aspek lingkungan</p>

**Misi 6:
Melaksanakan pengelolaan, penataan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkelanjutan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pembangunan wilayah Kabupaten Parigi Moutong	
3. Mewujudkan masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana	Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencana	<p>Meningkatkan kemampuan dan daya tanggap masyarakat terhadap bencana</p> <p>Meningkatkan koordinasi pengendalian pemantauan penanganan tanggap darurat bencana</p>	<p>Peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana</p> <p>Penyediaan dan pengembangan infrastruktur dan logistik penanganan bencana</p> <p>Pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana</p>